

TERIMA KUNJUNGAN BPN, OMBUDSMAN BANTEN: INOVASI HARUS JAWAB PERSOALAN RIIL MASYARAKAT

Selasa, 03 Februari 2026 - banten

SERANG - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, mendorong optimalisasi berbagai inovasi layanan pertanahan yang sedang dikembangkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia menekankan bahwa inovasi tidak boleh hanya sekadar ada, tetapi harus berdampak nyata pada efisiensi layanan.

"Inovasi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi, sepanjang inovasi tersebut benar-benar menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat dalam pelayanan pertanahan," ujar Fadli.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, di Kantor Ombudsman Banten, Senin (2/2/2026). Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas instansi guna mendorong pelayanan pertanahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.

Menanggapi dorongan tersebut, Harison Mocodompis menjelaskan bahwa pihaknya terus mengembangkan dan mengevaluasi inovasi yang ada. Ia memaparkan beberapa terobosan yang telah berjalan, seperti layanan konsultasi pertanahan via Zoom ("Sultan") untuk mengurangi mobilitas fisik pemohon, serta Kantor Virtual di Kota Tangerang.

"Selain itu, ada Sistem Kebut Pengendali Buku Tanah untuk mengatasi masalah hilangnya buku tanah. Untuk lebih mengoptimalkan inovasi, perlu dilakukan evaluasi rutin untuk peningkatan lebih lanjut," jelas Harison.

Dalam pertemuan tersebut, Fadli juga menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan laporan masyarakat yang masih menggantung. Ia merencanakan agenda khusus bersama BPN dalam waktu dekat.

"Dalam waktu dekat, Ombudsman Banten akan melakukan agenda bedah laporan masyarakat bersama BPN Provinsi Banten, khusus membahas laporan yang belum terselesaikan," tegas Fadli.

Merespons rencana tersebut, Harison menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi penuh. "Kami siap dalam agenda bedah laporan masyarakat dengan Ombudsman Banten. Kami akan hadirkan delapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten," pungkasnya.